

Hubungan antara koneksi politik terhadap kinerja lingkungan

Fitria Asas[✉], Ulfatul Khasanah, Faridatun Najiyah

Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Permata Bojonegoro

Article info	A b s t r a c t
Received [29 November 2021] Revised [4 Desember 2021] Accepted [6 Januari 2022]	<p>Each company has its own way and policy in managing aspects of responsibility to the environment. It is undeniable that the company's political connections have various benefits for the company itself. The entry of politics into the business world is based on mutual need, entrepreneurs need politics to save and develop their businesses as well as politics need material support for their political survival. Therefore, the purpose of this study is to see and test whether companies with political connections are good in environmental performance which has a good impact on company value. This study uses descriptive and multivariate analysis to test 320 samples of manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2015-2019. The results of this study prove that companies that have political connections have the opportunity to get high scores in environmental performance. Because the company will use its connections to change or increase its value.</p> <p>Keywords: political connection; performance; environment</p>
Corresponding author: Fitria Asas fitriaasas@gmail.com	<h3 data-bbox="606 1111 750 1142">A b s t r a k</h3> <p>Setiap perusahaan memiliki cara dan kebijakan masing-masing dalam mengelola aspek pertanggungjawaban kepada lingkungan. Tidak dapat dipungkiri koneksi politik yang dimiliki perusahaan memiliki berbagai manfaat bagi perusahaan itu sendiri. Masuknya politik didalam dunia bisnis didasari oleh saling membutuhkan, pengusaha membutuhkan politik untuk menyelamatkan dan mengembangkan usaha mereka begitu juga politik membutuhkan dukungan materil untuk keberlangsungan politik mereka. Oleh karena itu tujuan penelitian ini untuk melihat dan menguji apakah perusahaan yang berkoneksi politik baik dalam kinerja lingkungan yang berdampak baik pada nilai perusahaan. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan multivariat untuk menguji 320 sampel pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa perusahaan yang mempunyai koneksi politik mempunyai kesempatan untuk mendapatkan skor yang tinggi dalam kinerja lingkungannya. Karena perusahaan akan memanfaatkan koneksinya untuk merubah atau meningkatkan nilainya.</p> <p>Kata kunci: koneksi politik; kinerja; lingkungan</p>

Pendahuluan

Aspek lingkungan adalah aspek yang menjadi bahan pertimbangan dalam sektor ekonomi, karena dampak dari kegiatan ekonomi terhadap lingkungan mempengaruhi lingkungan itu sendiri (Pratama, 2013) Perusahaan bertanggungjawab terhadap lingkungan sekitar yang menerima dampak langsung terhadap kegiatan perusahaan, khususnya perusahaan industri yang limbahnya berdampak pada pencemaran lingkungan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dimana kinerja lingkungan perusahaan dievaluasi atas ketaatannya dalam mengelola limbah dan pencemarannya. Permasalahan lingkungan yang sering muncul antara lain seperti dan eksploitasi atau pengambilan sumber daya alam secara besar-besaran dari sumberdaya

mineral adalah terjadinya penurunan kualitas lingkungan seperti pencemaran pada tanah, polusi udara, dan hidrologi air. Beberapa contoh lokasi tambang yang telah mengalami penurunan kualitas lingkungan, antara lain tambang timah di Pulau Bangka, tambang batu bara di Kalimantan Timur dan tambang tembaga di Papua. Lubang-lubang bekas penambangan dan pembukaan lapisan tanah yang subur pada saat penambangan, dapat mengakibatkan daerah yang semula subur menjadi daerah yang tandus. Selanjutnya, kasus PT. Lapindo, perusahaan yang lebih mengutamakan penyelamatan aset-asetnya dari pada mengatasi persoalan lingkungan yang ditimbulkan, sehingga menimbulkan dampak buruk pada lingkungan di sekitar tempat pengeboran. Kemudian eksplorasi sumberdaya alam yang dilakukan oleh PT. Freeport Indonesia, yang selama bertahun-tahun dan telah menghasilkan triliunan rupiah ke dalam perusahaan tersebut, tidak diimbangi oleh perhatian khusus kepada dampak jangka panjang dilingkungan yang dinikmati oleh masyarakat sekitar (Sasmitha, 2015).

Setiap perusahaan memiliki cara dan kebijakan masing-masing dalam mengelola aspek pertanggungjawaban kepada lingkungan. Tidak dapat dipungkiri koneksi politik yang dimiliki perusahaan memiliki berbagai manfaat bagi perusahaan itu sendiri. Masuknya politik didalam dunia bisnis didasari oleh saling membutuhkan, pengusaha membutuhkan politik untuk menyelamatkan dan mengembangkan usaha mereka begitu juga politik membutuhkan dukungan materil untuk keberlangsungan politik mereka. Perusahaan yang terlibat dalam pemerintahan memiliki kesempatan dan kemampuan mempengaruhi undang-undang dan peraturan yang dapat berimbang dalam kebijakan perusahaan. Fisman (2001) mengatakan bahwa Indonesia adalah pelopor dalam menganalisis ikatan antara koneksi politik dan nilai perusahaan. Rujukan dimulai pertama kali dengan adanya hubungan antara Indonesia dengan Presiden Soeharto, tidak dapat dipungkiri bahwasanya perusahaan yang dimiliki beliu sangat banyak dan besar dan tidak jauh dari pengaruh politik yang beliu miliki di Indonesia. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa perusahaan dapat memperoleh manfaat yang signifikan dari koneksi politik, termasuk hubungan istimewa yang dibangun (Ang et al., 2011; Su & Fung, 2013; Faccio, 2006; Liu et al., 2018; Li et al., 2012). Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti ingin melihat koneksi politik yang dibangun perusahaan apakah memiliki nilai tambah bagi kinerja lingkungannya. Sebab Koneksi politik mempengaruhi perubahan kebijakan dalam sebuah negara, salah satunya terkait dengan pengungkapan lingkungan.

Teori signal (*signalling theory*)

Teori signal menjelaskan bagaimana seharusnya perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna informasi mengenai apa yang telah dilakukan perusahaan. Perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan informasi kepada pihak eksternal atau stakeholder perusahaan karena terdapat asimetri informasi antara perusahaan dengan pihak eksternal. Sehingga Strategi yang dilakukan perusahaan diharapkan dapat menjadi signal yang baik bagi pasar. Informasi yang dipublikasikan oleh perusahaan akan memberikan signal bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi (Hartono, 2010). Pada saat informasi diumumkan, pelaku pasar terlebih dahulu menginterpretasikan dan menganalisis informasi tersebut sebagai signal baik (*good news*) atau signal buruk (*bad news*). Jika informasi tersebut dianggap sebagai signal baik, maka investor akan tertarik untuk melakukan perdagangan saham, dengan demikian pasar akan bereaksi yang tercermin melalui perubahan dalam volume perdagangan saham (Suwardjono, 2010).

Teori legitimasi (*legitimacy theory*)

Teori legitimasi menegaskan bahwa untuk memperoleh kepercayaan dari masyarakat atas kegiatan yang dilakukan, maka perusahaan harus menentukan strategi untuk menjalankan kegiatannya sesuai kebutuhan dan kondisi lingkungan. Koneksi politik yang dibangun perusahaan menjadi komunikasi jalur penting untuk memperoleh legitimasi dari pihak yang diharapkan. Sehingga Perusahaan perlu megungkapkan informasi yang dapat memperkuat legitimasinya.

Koneksi politik

Perusahaan berkoneksi politik ialah perusahaan yang dengan cara tertentu mempunyai ikatan secara politik atau mengusahakan adanya kedekatan dengan politisi atau pemerintah (Purwoto, 2011). Keberadaan koneksi politik perusahaan diharapkan dapat memperkuat strategi yang dibangun perusahaan untuk mendapatkan nilai dalam pasar persaingan, seperti pada teori manajemen strategis yang dikatakan oleh (Glueck, William F, & Willis, 1979) bahwasanya sejumlah keputusan dan tindakan yang mengarah pada perumusan strategi atau sejumlah strategi yang efektif untuk membantu mencapai tujuan perusahaan. Beberapa penelitian yang menggunakan koneksi politik sebagai variabel

moderasi yang menggabungkan koneksi politik pada kegiatan atau aktivitas perusahaan seperti pada penelitian (Chen et al., 2004; Jia & Zhang, 2012).

Kinerja lingkungan

Pengukuran terhadap kinerja lingkungan di Indonesia dapat dilakukan dengan beberapa cara. Terdapat tiga indikator yang bisa digunakan yaitu AMDAL, ISO dan PROPER. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Proper adalah evaluasi ketaatan dan kinerja penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dibidang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, serta pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan Proper, bagi: (a) pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat instansi lingkungan hidup yang ditugaskan untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan; dan (b) dewan pertimbangan Proper dan tim teknis Proper untuk melakukan penilaian peringkat Proper.

Kinerja penataan yang dinilai dalam Kriteria Penilaian PROPER dibedakan menjadi 2, yaitu:

1. Kriteria ketaatan yang digunakan untuk pemeringkatan emas, hijau, biru, merah, dan hitam. Kriteria ketaatan pada dasarnya adalah penilaian ketaatan perusahaan terhadap peraturan lingkungan hidup. Peraturan yang digunakan sebagai dasar penilaian adalah peraturan: Penerapan Dokumen Lingkungan, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Pencemaran Udara, Pengelolaan Limbah B3, Pengendalian Kerusakan Lingkungan.
2. Kriteria penilaian aspek lebih dari yang dipersyaratkan (*beyond compliance*) untuk pemeringkatan hijau dan emas. Komponen yang dinilai adalah: Dokumen Ringkasan Kinerja Pengelolaan Lingkungan, Sistem Manajemen Lingkungan, Pemanfaatan Sumber Daya, Pengembangan Masyarakat.

Pengembangan hipotesis

Nys, E., Tarazi (2015) menjelaskan bahwa sebagian besar perusahaan saat itu sedang membuat lingkungan pengaturan terkait erat dengan koneksi politik. Barth, MB, McNichols, MF dan Wilson (1997) berpendapat bahwa pengungkapan lingkungan di Indonesia adalah terkait dengan biaya politik. Milne (2002) mengungkapkan hubungan politik adalah upaya perusahaan mengurangi tekanan politik dan menjadi sarana dan akses untuk pengungkapan yang lebih baik lingkungan perusahaan. Bambang (2020) hubungan politik dan budaya perusahaan mengungkapkan efek positif pengungkapan air perusahaan. Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Perusahaan yang berkoneksi politik baik dalam kinerja lingkungan

Metode penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif deskriptif. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pihak lain dalam bentuk publikasi. Dimana sumber data dalam penelitian ini berasal dari laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2012 - 2019. Dengan teknik (*purposive sampling*) yakni perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan perusahaan yang mengikuti Program PROPER selama 2012-2019, sehingga sampel yang digunakan sejumlah 320 laporan tahunan.

Kinerja lingkungan perusahaan diukur dari PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan) yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). PROPER merupakan program KLH untuk menilai prestasi perusahaan dalam pengelolaan lingkungannya. PROPER menggunakan peringkat untuk mengukur kinerja lingkungan perusahaan. Terdapat lima (5) kategori yang ditandai dengan warna-warna sebagai pemeringkatannya. Urutan peringkat dari yang terkecil ke yang terbesar dalam PROPER adalah hitam, merah, biru, hijau, dan emas menggunakan data ordinal yaitu pengukuran kinerja lingkungan menggunakan skor 1 hingga 5 (Pratama, 2013).

Kriteria dalam peringkat PROPER yaitu: Peringkat "Emas" (Skor 5), Peringkat "Hijau" (Skor 4), Peringkat "Biru" (Skor 3), Peringkat "Merah" (Skor 2), Peringkat "Hitam" (Skor 1).

Variabel independent dalam penelitian ini adalah koneksi politik (KP). Koneksi politik adalah perusahaan yang memiliki koneksi secara politik setidaknya salah satu pemegang saham yang besar (seseorang yang mengendalikan setidaknya 10% dari total saham dengan hak suara) atau salah satu pimpinan perusahaan (CEO, presiden, wakil presiden, ketua atau sekretaris) yang merupakan anggota parlemen, menteri, politikus atau partai politik (Faccio, 2006). Koneksi politik diukur menggunakan dummy, yakni memberikan angka 1 pada perusahaan yang berkoneksi dan 0 untuk yang tidak berkoneksi, pengukuran ini pernah dilakukan oleh (Ang et al., 2011; Su & Fung, 2013; Liu et al., 2018; Chen et al., 2004; Bencheikh & Taktak, 2017; Harymawan & Nowland, 2016; Li et al., 2012; Cheng, 2016).

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan software OLS (Ordinary Least Square) dengan menggunakan teknik Uji Statistik Deskriptif, memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi (Ghozali, 2009). Penelitian ini menggunakan Regresi sederhana yakni metode pendekatan hubungan antara satu variabel dependen dan satu variabel independen, dengan rumus: $KL_i = a_1 + b_1 KP + e_1$ dimana KL (Kinerja Lingkungan) dan KP (Koneksi Politik).

Hasil dan diskusi

Data yang disajikan dalam penelitian ini berasal dari perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup selama lima tahun terakhir yakni 2012 hingga 2019 pada perusahaan yang bergerak dalam sektor manufaktur seperti, sub sektor semen, keramik, logam, kimia, plastik dan kemasan, pakan ternak, kayu, pulp dan kertas, mesin dan alat berat, otomotif dan komponen, tekstil dan garmen, alas kaki, kabel, elektronika, makanan dan minuman, rokok, farmasi, kosmetik, dan peralatan rumah tangga. Jumlah perusahaan yang bergerak dalam sektor manufaktur yang *listed* di Bursa Efek Indonesia dan telah mengikuti program PROPER sebanyak 132 perusahaan, dengan total laporan keuangan yang diperoleh sebanyak 320 yang layak dijadikan sebagai objek penelitian. Dari 320 laporan tahunan yang digunakan dalam pengamatan, statistik deskriptif menunjukkan data sebagai berikut:

Tabel 1. Pengamatan statistik deskriptif laporan tahunan

	Mean	SD	0	1	2	3	4	5
KP	0,30	0,459	7,0	3,0	-	-	-	-
KL	2,74	0,968	7,2	-	16,6	66,9	6,3	3,1

Dari hasil statistik diatas terlihat bahwa perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia yang memiliki koneksi politik pemerintahan sebesar 3,0 atau 30% dari total keseluruhan dan yang tidak memiliki koneksi sebesar 7,0 atau 70%. Sedangkan untuk kinerja lingkungan perusahaan yang mendapatkan skor emas (5) sebesar 3,1%, yang mendapat skor hijau (4) sebesar 6,3%, yang mendapatkan skor biru (3) sebesar 66,9%, dan yang mendapat skor merah 16,6%.

Tabel 2. Hasil uji regresi

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	2.683	.064		41.605	.000*
	Koneksi Politik	.202	.118	.096	1.719	.087**

a. Dependent Variable: Kinerja Lingkungan

*sig ≤ 0,05 ** sig ≤ 0,1

Dari hasil SPSS maka didapat persamaan regresi yaitu: $KL_1 = 2.683_1 + 0.202_1 KP + e_1$, dimana nilai konstan 2.683 menunjukkan nilai positif yang artinya apabila semua variabel independent nilainya 0, maka koneksi politik nilainya 0.202%.

Hasil pengujian di atas menyatakan bahwa hipotesis perusahaan yang berkoneksi politik baik dalam kinerja lingkungan atau H1a diterima. Hal ini terbukti dari nilai t sebesar 1.719 dengan nilai

signifikansi sebesar 0.087 lebih kecil dari α 10% (0.1) jadi dapat dikatakan berpengaruh positif. Sehingga dapat dikatakan penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan (Ang et al., 2011; Bencheikh & Taktak, 2017; Faccio, 2006; Li et al., 2012) bahwa perusahaan dapat memperoleh manfaat yang signifikan dari koneksi politik, termasuk hubungan istimewa yang dibangun. Perusahaan yang terlibat dalam pemerintahan memiliki kesempatan dan kemampuan mempengaruhi undang-undang dan peraturan yang dapat berimbas kinerja perusahaannya.

Kesimpulan

Pada penelitian ini terlihat bahwa perusahaan yang mempunyai koneksi politik mempunyai kesempatan untuk mendapatkan skor yang tinggi dalam kinerja lingkungannya. Karena perusahaan akan memanfaatkan koneksinya untuk merubah atau meningkatkan nilainya. Kelemahan pada penelitian ini adalah belum ada penguat yang dari variabel lain, oleh karena itu untuk penelitian selanjutnya bisa ditambah penguat variabel lain.

Daftar pustaka

- Ang, J. S., Ding, D. K., & Yang THONG, T. (2011). *Political Connection and Firm Value*. http://ink.library.smu.edu.sg/lkcsb_research/4439
- Bambang. (2020). Influence of Political Connection and Corporate Culture on Water Disclosure in Indonesia. *Talent Development & Excellence* 1713, 12(2).
- Barth, MB, McNichols, MF dan Wilson, G. (1997). Faktor yang mempengaruhi pengungkapan perusahaan tentang kewajiban lingkungan. *Review Studi Akuntansi*, 2, 35–64.
- Bencheikh, F., & Taktak, N. B. (2017). The Effect of Political Connections on the Firm Performance in a Newly Democratised Country. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 8(4), 40–46. <https://doi.org/10.1515/mjss-2017-0004>
- Chen, D.-H., Fan, J. P. H., & Wong, T. J. (2004). Politically-connected CEOs, Corporate Governance and Post-IPO Performance of China's Partially Privatized Firms. In *Center for Economic Institutions Working Paper Series*. <http://hdl.handle.net/10086/13901>
- Cheng, L. (2016). *Essays on Microeconomic Applications in Political Economy and Business Strategy*.
- Faccio, M. (2006). American Economic Association Politically Connected Firms. In *Source: The American Economic Review* (Vol. 96, Issue 1).
- Fisman, R. (2001). Estimating the Value of Political Connections. *The American Economic Review*, 91(4), 282. <http://www.jstor.org/stable/2677829>
- Ghozali, I. (2009). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. (Edisi IV). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Glueck, William F, & Willis, R. (1979). Documentary Sources and Strategic Management Research. *Academy of Management Review*, 4(1), 95–102.
- Hartono, J. (2010). *Studi Peristiwa: Menguji Reaksi Pasar Modal Akibat Suatu Peristiwa*. BPFE UGM.
- Harymawan, I., & Nowland, J. (2016). Political connections and earnings quality: How do connected firms respond to changes in political stability and government effectiveness? *International Journal of Accounting and Information Management*, 24(4), 339–356. <https://doi.org/10.1108/IJAIM-05-2016-0056>
- Jia, M., & Zhang, Z. (2012). Women on boards of directors and corporate philanthropic disaster response. *China Journal of Accounting Research*, 5(1), 83–99. <https://doi.org/10.1016/j.cjar.2012.01.001>
- Li, W., He, A., Lan, H., & Yiu, D. (2012). Political connections and corporate diversification in emerging economies: Evidence from China. *Asia Pacific Journal of Management*, 29(3), 799–818. <https://doi.org/10.1007/s10490-011-9265-5>
- Liu, F., Lin, H., & Wu, H. (2018). Political connections and firm value in china: An event study. *Journal of Business Ethics*, 152(2), 551–571. <https://doi.org/10.1007/s10551-016-3316-2>
- Milne, M. (2002). Teori akuntansi positif, biaya politik dan analisis pengungkapan sosial: tampilan kritis. *Perspektif Kritis Tentang Akuntansi*, 13(3), 369–395.
- Nys, E., Tarazi, A. dan T. (2015). Hubungan politik, deposito bank, dan formalia asuransi simpanan. *Jurnal Stabilitas Keuangan*, 19, 83–104.

- Pratama, A. G. R. (2013). Pengaruh Good Corporate Governance dan Kinerja Lingkungan Terhadap Pengungkapan Lingkungan. *Diponegoro Journal of Accounting, Volume 2*, Halaman 1-14. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Purwoto, L. (2011). Pengaruh Koneksi Politis, Kepemilikan Pemerintah dan Keburaman Laporan Keuangan terhadap Kesinkronan dan Risiko Crash Harga Saham. *Ringkasan Disertasi Program Doktor Ilmu Ekonomi Manajemen. Universitas Gadjah Mada.*
- Sasmitha, M. (2015). Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Pengungkapan Perusahaan. *28 April 2015*. <http://mei270593.blogspot.co.id/2015/04/pengungkapan-corporate-social.html>.
- Su, Z. qin, & Fung, H. G. (2013). Political connections and firm performance in Chinese companies. *Pacific Economic Review, 18*(3), 283–317. <https://doi.org/10.1111/1468-0106.12025>
- Suwardjono. (2010). *Teori Akuntansi: Pengungkapan dan Sarana Interpretatif*. BPFE.